

LAMPIRAN I
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR PER-1/PP/2024
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama (sesuai KTP) :.....(1).....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....(2).....
Alamat Rumah :.....(3).....
:
Nomor Kartu Tanda
Penduduk :.....(4).....
Pendidikan Formal :1.(5).....
(Cantumkan Tahun 2.
Lulus dan Nama 3.
Pendidikan) 4.
5.
6.
Pekerjaan :.....(6).....
Alamat Surel (*eMail*) :.....(7).....
Pengalaman Kerja :(8).....
:
.....(9).....(10).....

.....(11).....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

Isian dalam daftar riwayat hidup diisi dengan lengkap menggunakan huruf balok/kapital dan dicetak.

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.
- Nomor (2) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat rumah Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (5) : diisi dengan riwayat pendidikan formal Pemohon Izin Kuasa Hukum dengan menyertakan tahun lulus dan nama pendidikan pada setiap jenjang pendidikan.
- Nomor (6) : diisi dengan pekerjaan pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (7) : diisi dengan alamat surat elektronik (*e-Mail*) Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (8) : diisi dengan riwayat pengalaman kerja Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (9) : diisi dengan kota tempat daftar riwayat hidup dibuat.
- Nomor (10) : diisi dengan tanggal dibuatnya daftar riwayat hidup.
- Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Pemohon Izin Kuasa sesuai KTP.

LAMPIRAN II
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR PER-1/PP/2024
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAU PEJABAT NEGARA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

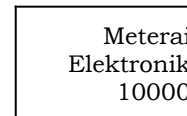
Nama (sesuai KTP) :.....(1).....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....(2).....
Alamat Rumah :.....(3).....
:.....
Nomor Kartu Tanda Penduduk :.....(4).....

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Pusat/Daerah atau pejabat negara;
2. apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

.....(5).....,(6).....



(.....(7).....)

Keterangan:

Isian dalam Surat Pernyataan diisi dengan lengkap menggunakan huruf balok/kapital dan dicetak.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.
- Nomor (2) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat rumah Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (5) : diisi dengan kota tempat Surat Pernyataan dibuat.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat.
- Nomor (7) : diisi dengan tanda tangan dan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.

LAMPIRAN III
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR PER-1/PP/2024
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

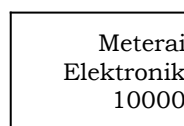
Nama (sesuai KTP) :.....(1).....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....(2).....
Alamat Rumah :.....(3).....
:.....
Nomor Kartu Tanda Penduduk :.....(4).....

Sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. dalam menjalankan tugas sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, saya berjanji akan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya;
2. tidak akan melakukan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. akan menjalankan tugas secara bertanggung jawab, transparan, dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

.....(5).....,(6).....



(.....(7).....)

Keterangan:

Isian dalam Pakta Integritas diisi dengan lengkap menggunakan huruf balok/kapital dan dicetak.

PETUNJUK PENGISIAN
PAKTA INTEGRITAS

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.
- Nomor (2) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat rumah Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (5) : diisi dengan kota tempat Pakta Integritas dibuat.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Pakta Integritas dibuat.
- Nomor (7) : diisi dengan tanda tangan dan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR PER-1/PP/2024
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

FORMAT SURAT PERNYATAAN SEMUA DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN ADALAH BENAR DAN SESUAI ASLINYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

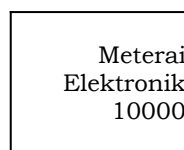
Nama (sesuai KTP) :.....(1).....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....(2).....
Alamat Rumah :.....(3).....
:.....
Nomor Kartu Tanda Penduduk :.....(4).....

dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya benar telah mengajukan permohonan/perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak;
2. data dan dokumen yang saya sampaikan untuk permohonan Izin Kuasa Hukum adalah benar dan sesuai aslinya;
3. saya telah membaca, memahami, dan bersedia untuk mentaati Peraturan Ketua Pengadilan Pajak tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak;
4. apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, Izin Kuasa Hukum saya bersedia untuk dicabut dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan sebagai Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

.....(5).....,(6).....



(.....(7).....)

Keterangan:

Isian dalam Surat Pernyataan diisi dengan lengkap menggunakan huruf balok/kapital dan dicetak.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.
- Nomor (2) : diisi dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat rumah Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (5) : diisi dengan kota tempat Surat Pernyataan dibuat.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dibuat.
- Nomor (7) : diisi dengan tanda tangan dan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.

LAMPIRAN V
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR PER-1/PP/2024
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

FORMAT PERMOHONAN DINYATAKAN LENGKAP

Yth.(1).....

Berkenaan dengan permohonan Izin Kuasa Hukum yang Saudara sampaikan dengan detail data sebagai berikut:

Nomor agenda :(2).....
Nama Pemohon :(3).....
NPWP Pemohon :(4).....
Jenis Izin Kuasa Hukum :(5).....
Tanggal pengajuan :(6).....

telah dilakukan penelitian oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Sesuai hasil penelitian Sekretariat Pengadilan Pajak terhadap permohonan tersebut, diketahui bahwa permohonan yang Saudara ajukan tersebut **telah lengkap** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak jo. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

Sekretariat Pengadilan Pajak

Disclaimer:

Surat ini dicetak oleh komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN DINYATAKAN LENGKAP

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor agenda pengajuan permohonan Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (3) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (4) : diisi dengan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.
- Nomor (5) : diisi dengan jenis Izin Kuasa Hukum yang diajukan.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal pengajuan Izin Kuasa Hukum yang diterima Pengadilan Pajak.

LAMPIRAN VI
PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR PER-1/PP/2024
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN
IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK

FORMAT PERMOHONAN DINYATAKAN TIDAK LENGKAP

Yth.(1).....

Berkenaan dengan permohonan Izin Kuasa Hukum yang Saudara sampaikan dengan detail data sebagai berikut:

Nomor agenda :(2).....
Nama Pemohon :(3).....
NPWP Pemohon :(4).....
Jenis Izin Kuasa Hukum :(5).....
Tanggal pengajuan :(6).....

telah dilakukan penelitian oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Sesuai hasil penelitian Sekretariat Pengadilan Pajak terhadap permohonan tersebut, diketahui bahwa permohonan yang Saudara ajukan tersebut tidak terbaca/tidak sesuai/belum dilengkapi dengan dokumen atau data pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak jo. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

Kelengkapan dokumen yang tidak terbaca/tidak sesuai/belum dilengkapi tersebut adalah sebagai berikut:

1.(7).....
2.
3. Dst

Catatan tambahan:

.....(8).....
.....
.....

Mohon Saudara untuk dapat melengkapi kekurangan/ketidaksesuaian dokumen melalui tautan berikut(9)..... dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan ini kami sampaikan.

Apabila Saudara tidak melengkapi dalam jangka waktu tersebut, permohonan tidak dapat ditindaklanjuti untuk diberikan Izin Kuasa Hukum dan Saudara harus mengajukan permohonan baru.

Sekretariat Pengadilan Pajak

Disclaimer:

Surat ini dicetak oleh komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN KEKURANGAN DOKUMEN

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor agenda pengajuan permohonan Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (3) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon Izin Kuasa Hukum.
- Nomor (4) : diisi dengan nama Pemohon Izin Kuasa Hukum sesuai KTP.
- Nomor (5) : diisi dengan jenis Izin Kuasa Hukum yang diajukan.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal pengajuan Izin Kuasa Hukum diterima Pengadilan Pajak.
- Nomor (7) : diisi dengan daftar kekurangan dokumen.
- Nomor (8) : diisi dengan catatan tambahan dari petugas/pemeriksa.
- Nomor (9) : diisi tautan untuk melengkapi kekurangan dokumen.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2024

KETUA PENGADILAN PAJAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ALI HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS PENGADILAN PAJAK



Ditandatangani secara elektronik
DENDI AGUNG WIBOWO

